

KEADILAN EKOLOGIS DI DALAM KONFLIK AGRARIA: STUDI KASUS PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK TAMBANG BATU ANDESIT DI DESA WADAS TAHUN 2022

Faesar Mubarak

ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sudah berlangsung sejak 2018. Pengadaan yang terjadi mengalami berbagai penolakan dari warga kontra penambangan batu andesit, yang kemudian menjadi konflik antara warga Wadas dengan pemerintah yang mengelola PSN. Penelitian pada skripsi ini mengkaji mengenai konflik agraria yang telah terbangun sejak lama, berdasarkan pemahaman dari teori konflik, resolusi konflik dan konsep penyelesaian masalah lingkungan. Pada penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik yang terjadi, bagaimana peran pemerintah hadir untuk mencari solusi menyelesaikan masalah pembangunan. Kemudian, peneliti juga mencari tahu akar masalah yang melatarbelakangi terbentuknya konflik tanah di Desa Wadas dan melihat andil aktor yang menyulut konflik yang sudah berlangsung lama tersebut.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui kajian literatur, wawancara, serta melalui observasi. Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang diteliti yakni Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, akademisi, dan warga Wadas yang terlibat di dalam konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah di Desa Wadas untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener dilakukan secara inkonstitusional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah untuk 'memaksa' Proyek Strategis Nasional itu tetap terwujud. Pemerintah melakukan pemberlakuan izin lingkungan yang bermasalah, melakukan tindakan represif dan intimidasi terhadap warga kontra penambangan, kemudian penambangan yang dilakukan dengan memiliki ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan hidup di Desa Wadas. Dalam kerangka keadilan ekologis, untuk melaksanakan proyek pembangunan penting mengutamakan transparansi, keterbukaan informasi dan partisipasi aktif, namun pemerintah tidak berupaya melakukan hal tersebut. Melihat demikian, pada konteks penyelesaian masalah agraria berdasarkan pendekatan pragmatisme demokrasi, setiap keputusan pembangunan harus melibatkan semua pihak, mendengarkan pandangan, dan merundingkan solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Konflik agraria dapat diatasi dengan cara yang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, PSN, Konflik, Lingkungan

ENVIRONMENTAL JUSTICE IN AGRARIAN CONFLICT: A CASE STUDY OF LAND ACQUISITION FOR ANDESITE MINING PROJECTS IN WADAS VILLAGE, 2022

Faesar Mubarok

ABSTRACT

Land procurement for the Bener Bendungan National Strategic Project (PSN) in Wadas Village, Purworejo Regency, Central Java has been going on since 2018. The procurement has experienced various objections from residents who are against andesite mining, which then became a conflict between Wadas residents and the government that manages it. PSN. The research in this thesis examines agrarian conflicts that have been building for a long time, based on an understanding of conflict theory, conflict resolution and the concept of environmental problem solving. This research also aims to analyze the resolution of conflicts that occur, how the role of government is present in finding solutions to resolve development problems. Then, researchers also sought to find out the root of the problem behind the formation of the land conflict in Wadas Village and looked at the role of the actors who sparked this long-standing conflict.

This thesis uses qualitative research methods, by collecting data through literature review, interviews, and through observation. In this research, the research subjects studied were the Yogyakarta Forum for the Environment (Walhi), the Yogyakarta Legal Aid Institute (LBH), academics, and Wadas residents who were involved in the conflict.

The research results show that land acquisition in Wadas Village for the purposes of building the Bener Dam was carried out unconstitutionally. This can be seen from several actions taken by the government to 'force' the National Strategic Project to materialize. The government implemented problematic environmental permits, carried out repressive actions and intimidated residents who were against mining, then the mining carried out posed a threat to the sustainability of the environment in Wadas Village. Within the framework of ecological justice, to implement development projects it is important to prioritize transparency, openness of information and active participation, but the government is not trying to do this. Seeing this, in the context of resolving agrarian problems based on a democratic pragmatism approach, every development decision must involve all parties, listen to views, and negotiate solutions that consider the interests of all parties. Agrarian conflicts can be resolved in a way that is more effective and acceptable to all stakeholders involved.

Keywords: *Land Acquisition, PSN, Conflict, Environment*